

**ANALISIS PROGRAM IP200 (INDEKS PERTANAMAN DUA KALI
PANEN DALAM SETAHUN)
DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**NAMA : ANJELISA PEBRIANTI
NIM : 220411013**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

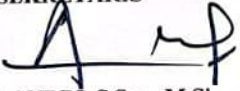
Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 08
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SEKRETARIS


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si

(Pembimbing I)

()

2. Sahri Muharam, S.Sos., M.Si

(Anggota)

()

3. Risvandi, SPd.I., M.Si

(Anggota)

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PROGRAM IP200 DI DESA TEBING
TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : ANJELISA PEBRIANTI
NPM : 220411013
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : ANJELISA PEBRIANTI
NPM : 220411013
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Juni 2026



ANJELISA PEBRIANTI
NPM. 220411013

MOTTO

“Bahwasannya ilmu itu menambah mulia orang yang sudah mulia dan meninggikan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja”.
(Al-Hadist)

“Barangsiapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dikaruniakan Allah kepadanya jalan ke surga”.
(Al-Hadist)

“Bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi menjalani pergi mempelajari suatu bab dari ilmu, adalah lebih baik daripada engkau salat sunat 100 rakaat”.
(Al-Hadist)

“Menghadiri majelis berilmu lebih utama daripada mendirikan salat sunat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit dan bertakziah 1000 jenazah”.
(Al-Hadist)

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Safrin Joni** dan **Ibunda Fitriani**, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis sehingga dapat mengecap pendidikan serta dapat menyaksikan keindahan dunia ini. Terima kasih juga telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga sudah menjadi penyemangat terhebat dalam kehidupan penulis.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



ANJELISA PEBRIANTI
NPM. 220411013

KATA PENGANTAR

رومكيدعم لاسلامه ت ا ك ربوالله اة

Sebuah ucapan rasa syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya, terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan proposal ini dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, berkat petunjuk dan keredhoan-Nya. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Proposal penelitian dengan judul : **“Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan urgensi sebuah program IP200, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program IP200 tersebut terlaksana dan memberikan dampak bagi masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Mamfaat penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi kepada objek yang diteliti, sehingga memberikan rekomendasi sebagai acuan memperbaiki pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian proposal penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran

serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan proposal penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya proposal penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I, sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah mengacc judul penelitian sebagai salah satu syarat untuk proposal penelitian ini dapat diseminarkan.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku pembimbing I penulis yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
7. Bapak Andrisman selaku Kepala Desa dan perangkat desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah memberikan

izin untuk melakukan penelitian ini, dan penulis dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

8. Bapak Rico Nopriansyah, SP selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Anggota Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senantiasa memberikan motivasi, support, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk penulis. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepada Sang Maha Pencipta agar kita dipertemukan di Syurga-Nya serta senantiasa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

رومكيدعم لاسل اوحمة تاكربو الله اة
Teluk Kuantan, 19 Januari 2026
Penulis

ANJELISA PEBRIANTI
NPM. 220411013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
TANDA ORISINALIS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK INDONESIA	vii
ABSTRAK INGGRIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara	12
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan	15
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan	20
2.1.4 Teori/Konsep Organisasi	27
2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa	30
2.1.6 Teori/Konsep Indeks Pertanaman 200 dan Ketahanan Panangan	34
2.2 Kerangka Pemikiran	38
2.3 Hipotesa Penelitian	39
2.4 Definisi Operasional	39
2.5 Operasional Variabel	40

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Informan	42
3.3 Sumber Data	42
3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	43
3.4 Fokus Penelitian	43
3.5 Lokasi Penelitian	43
3.6 Metode Pengumpulan Data	43
3.6.1 Wawancara (<i>interview</i>).....	43
3.6.2 Observasi (<i>observation</i>)	43
3.6.3 Dokumentasi (<i>documentation</i>).....	43
3.6.4 Gabungan (<i>triangulasi</i>)	44
3.7 Metode Analisis Data.....	44
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Tebing Tinggi	47
4.2 Lokasi Geografi	47
4.2.1 Keadaan Geografi	47
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah	48
4.2.3 Keadaan Penduduk	49
4.2.4 Tingkat Pendidikan.....	52
4.2.5 Sarana dan Prasarana Desa Tebing Tinggi.....	53
4.2.6 Keadaan Ekonomi.....	53
4.2.7 Keadaan Pemerinta Desa	54
4.2.7.1 Pembagian Wilayah Desa	54
4.2.7.2 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)	54
4.2.7.2 VISI MISI Desa Tebing Tinggi	55

BABA V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Indentitas Responden	57
5.1.1 Indentitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
5.1.2 Indentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57

5.2 Pembahasan dan Hasil Tentang Analisis Program IP200 Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	58
5.2.1 Luas Lahan Petani yang Mengikuti Program IP200 Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	58
5.2.2 Pendidikan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.. ...	62
5.2.3 Umur Petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.. ...	67
5.2.4 Pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.. ...	70
5.2.5 Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	73
5.3 Analisis Hasil Penelitian.....	78
BAB VI: PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran.....	86
6.2.1 Bagi Pemerintah Desa	86
6.2.2 Bagi Petani Desa Tebing Tinggi	87
6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	87
DAFTAR PUSTAK	87

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	: Rab IP 200 Tahun 2024.....	9
II. 1	: Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
III. 1	: Informan Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	42
III. 2	: Jadwal Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	47
IV.1	: Nama kepala Desa	50
IV.2	: Jumlah Pendidikan Menurut Jenis Kelamin.....	50
IV.3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	50
IV.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	51
IV.5	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	52
IV.6	: Tingkat Pendidikan	52
IV.7	: Prasarana Desa Tebing Tinggi	53
V.1	: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
V.2	: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. 1 : Kerangka Pikiran Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerinta Desa Tebing Tinggi ...	55
Gambar I : Wawancara Dengan Kepala Desa	
Gambar II : Wawancara Dengan Sekretaris Desa	
Gambar III : Wawancara Dengan BPD	
Gamnbar IV : Wawancara Dengan Kepala Dusun Muaro	
Gambar V : Wawancara Dengan Kepala Urusan Pelaksana Program IP200	
Gambar VI : Wawancara Dengan Kepala Seksi Pelaksana Program IP200	
Gambar VII : Wawancara Dengan Petani	
Gambar VIII : Wawncara Dengan Petani	
Gambar IX : Wawancara Dengan Petani	
Gambar XI : Wawancara Dengan Petani	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
I	: Lembar/Catatan Bimbingan Proposal Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
II	: Daftar Wawancara	
III	: Dokumentasi Penelitian	
IV	: Surat Keputusan Dekan Tentang Penujukan Pembimbing Skripsi	
V	: Catatan Bimbingan Skripsi	
VI	: Daftar Riwayat Hidup	

ANALISIS PROGRAM IP200 DI DESA TEBING TENGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Oleh :

Anjelisa Pebrianti

Desa Tebing Tinggi, terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pemerintah Desa Tebing Tinggi telah mengupayakan sistem IP200 sejak tahun 2020. Keberhasilan program IP200 juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk, dan alat pertanian, serta partisipasi aktif masyarakat tani. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Badan Permusyawaratan Desa Kepala Dusun Muaro dan petani Dusun Muaro yang semuanya berjumlah 13 orang. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program IP200 di Desa Tebing Tinggi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan intensitas tanam, produksi padi, dan pendapatan petani. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim tertentu, serangan hama, keterbatasan sarana produksi, dan belum meratanya partisipasi petani. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain perbaikan jaringan irigasi, koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait, penyuluhan kepada petani, serta penguatan kerja sama kelompok tani. Dengan pelaksanaan yang lebih optimal, Program IP200 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Kata Kunci : IP200, Desa, Program.

**ANALYSIS OF THE IP200 PROGRAM IN TEBING TENGGI VILLAGE
BENAI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ABSTRACT

By:

Anjelisa Pebrianti

Tebing Tinggi Village, located in Benai District, Kuantan Singingi Regency, is a rural area with significant agricultural potential. The Tebing Tinggi Village Government has been implementing the IP200 system since 2020. The success of the IP200 program also depends heavily on local government support, the availability of agricultural inputs such as superior seeds, fertilizers, and agricultural tools, as well as the active participation of the farming community. The research method used was a survey, with a descriptive explanation level and qualitative data analysis. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Head of Affairs, Head of Section, Village Consultative Body, Head of Muaro Hamlet, and 13 farmers from Muaro Hamlet. The informant selection technique used purposive sampling, while data collection included interviews, observation, documentation, and a combination of techniques. The results show that the implementation of the IP200 Program in Tebing Tinggi Village has had a positive impact on increasing cropping intensity, rice production, and farmers' income. However, the program still faces several obstacles, including limited irrigation water during certain seasons, pest attacks, limited agricultural production facilities, and uneven farmer participation. Efforts to overcome these obstacles include improving irrigation networks, strengthening coordination between the village government and related agencies, providing agricultural extension services to farmers, and enhancing cooperation among farmer groups. Therefore, optimizing the implementation of the IP200 Program is expected to improve farmers' welfare and support regional food security.

Keywords : IP200, Village, Program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris, yang terletak di Asia Tenggara dan beriklim tropis, menjadikan tanah di Indonesia menjadi sangat subur. sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Di negara agraris, pertanian mempunyai peranan yang sangat penting selain menunjang pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu pertanian berperan besar dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan. Sebagian besar pekerjaan mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang. Dari angka tersebut, terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan 38,23 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76%. Sebagai sektor yang menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat Indonesia, pertanian menghadapi banyak tantangan, dimana semakin bertambahnya permintaan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini tidak berbanding lurus dengan minat masyarakat yang mulai tidak menekuni sektor pertanian disebabkan faktor urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota, belum lagi ditambah dengan program nawa cita pemerintah Republik Indonesia yaitu membangun dari desa. Hal ini berdampak terhadap semakin sedikitnya lahan pertanian yang tersedia disebabkan pembangunan sarana infrastruktur dan juga pembangunan pemukiman perumahan dan lain-lain. Masalah lain yang dihadapi oleh petani adalah faktor pasar atau penjualan hasil pertanian, ditengah tidak stabilnya harga

penjualan hasil pertanian, tantangan lainnya adalah masalah infrastruktur atau transportasi dalam mengangkut hasil pertanian dari lahan pertanian menuju tempat penjualan hal ini menyebabkan sering kali harga pertanian.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris berarti juga negara sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan mengandalkan sektor pertanian, yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Bidang pertanian merupakan sektor berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional seperti yang dicanangkan oleh pemerintah dan penanggulangan kemiskinan karena bertani merupakan mata pencaharian petani. Usaha tani adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekelompok orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan dengan tujuan memproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menyebutkan bahwa sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memperluas meningkatkan pegeanekaragaman dan hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Sistem budi daya pertanian berkelanjutan ini dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Di Provinsi Riau, saat ini juga terus menggalakkan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat selain dari program ketahanan pangan yang digerakkan oleh Pemerintah republik Indonesia. Program ini, digalakkan terutama pada daerah-daerah yang menjadi lumbung padi di Provinsi Riau, upaya ini diwujudkan melalui program Indeks Pertanaman 200 (selanjutnya disingkat IP200). Program ini merupakan ukuran tingkat produktivitas lahan pertanian yang ditunjukkan oleh jumlah panen dalam setahun. Jarak antara satu panen ke panen berikutnya sangat berpengaruh terhadap besarnya indeks pertanaman. Panen yang lebih sering berarti indeks pertanaman akan semakin tinggi.

Jika lahan mampu menghasilkan dua kali panen dalam satu tahun, maka disebut IP200. Berbagai faktor mempengaruhi kemampuan lahan untuk menghasilkan panen lebih dari sekali, seperti ketersediaan air, cuaca, jenis tanaman, dan teknologi pertanian. Dengan pemanfaatan unsur-unsur tersebut, indeks pertanaman di harapkan dapat terus meningkat. Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, pemerintah melalui program intensifikasi pertanian mendorong penerapan IP200 yang bertujuan agar petani dapat melakukan dua kali tanam dan panen padi dalam satu tahun kalender, dengan demikian diharapkan produktivitas lahan dan pendapatan petani juga meningkat secara signifikan.

Salah satu daerah kabupaten di Provinsi Riau yang melaksanakan program ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Benai Desa Tebing Tinggi. Dipilihnya Desa Tebing Tinggi sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program IP200 karena memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung,

seperti ketersediaan lahan sawah yang cukup luas serta akses irigasi yang relatif baik. Selain itu, masyarakat petani di desa ini memiliki semangat tinggi untuk berinovasi dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala seperti pengaturan pola tanam yang belum optimal, keterbatasan sarana produksi pertanian, serta kurangnya pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Pemerintah telah mendorong peningkatan produksi pangan melalui berbagai program salah satunya adalah program IP200. Program IP200 ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilan program IP200 ini tergantung masyarakatnya mau atau tidak berpartisipasi dalam program tersebut.

Meskipun potensi dan dukungan pemerintah ada, pelaksanaan program IP200 ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program IP200 dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan tujuan program IP200.

Desa Tebing Tinggi, terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Wilayah ini didukung oleh sumber daya alam yang melimpah ruah, khususnya tanah subur dan pasokan air yang memadai.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian adalah melalui program IP200. Program IP200 ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah dengan meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun. Program ini diharapkan mampu

meningkatkan produksi pangan, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional serta meningkatkan taraf hidup petani di Desa Tebing Tinggi.

Lahan pertanian di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, didominasi oleh sawah yang memiliki luas sekitar 79,30 Hektare dan merupakan salah satu penghasil padi di Desa Tebing Tinggi. Lahan ini telah dikelola dengan sistem IP200 untuk meningkatkan produksi, dari luas lahan pertanian sawah di Desa Tebing Tinggi 79,30 hektare pada tahun 2023, produksi padi dari lahan ini mencapai 480,00 Ton. Pemerintah Desa Tebing Tinggi telah mengupayakan sistem IP200 sejak tahun 2020. Upaya ini terbukti efektif, dengan hasil panen pada program IP200 mencapai 6,4 Ton per Hektare saat panen raya yang dihadiri oleh Gubernur Riau dan Bupati Kuantan Singingi pada Oktober 2021.

Jumlah petani di Desa Tebing Tinggi sekitar 140 orang petani yang terlibat dalam program IP200. Petani padi di Desa Tebing Tinggi adalah bagian dari sektor pertanian yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau, seperti yang terlihat dari kunjungan Gubernur Riau pada kegiatan panen raya padi sawah dengan IP200. Kondisi pertanian Desa Tebing Tinggi sebenarnya memiliki potensi sawah yang bisa ditanami lebih dari dua kali dalam satu tahun.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tingkat keterlibatan warga setempat. Derajat partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, menjadi faktor kunci untuk mendukung keberlanjutan program ini. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat yang belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini, kurangnya

kesadaran masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari program ini, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait.

Selain itu, tingkat keberhasilan program IP200 juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk, dan alat pertanian, serta partisipasi aktif masyarakat tani. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program IP200 tersebut dalam meningkatkan produktivitas lahan, pendapatan petani, serta keberlanjutan sistem pertanian di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, beberapa petani sempat mengeluhkan keterbatasan air karena sumur artesis yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi untuk seluruh areal pertanian, seperti yang diutarakan petani pada tahun 2021.

Akan tetapi, dalam beberapa tahun belakangan, upaya optimalisasi sektor pertanian seringkali dihadang oleh berbagai kendala, seperti rendahnya produktivitas lahan, terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program pertanian berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Indeks Pertanaman 200 (IP-200) di Dusun Muaro, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada potensi lahan pertanian padi sawah yang dimiliki wilayah Dusun Muaro serta kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Kondisi lahan sawah yang relatif subur dan didukung ketersediaan sumber air

memungkinkan dilakukannya peningkatan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali tanam dalam satu tahun.

Program IP-200 juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang ketahanan pangan dan pembangunan pertanian, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui intensifikasi tanam padi. Dusun Muaro ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi dan memiliki kesiapan dalam menerima inovasi pertanian.

Selain itu, dasar pelaksanaan program ini mengacu pada kebutuhan peningkatan kesejahteraan petani Dusun Muaro. Dengan penerapan IP-200, diharapkan petani mampu meningkatkan hasil produksi padi, memperpendek masa berat lahan, serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara teknis, pelaksanaan Program IP-200 di Dusun Muaro didukung oleh pendampingan penyuluh pertanian lapangan, penyediaan sarana produksi pertanian, serta pengelolaan sistem irigasi dan pola tanam yang lebih terencana. Dengan dasar tersebut, Program IP-200 di Dusun Muaro diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Program IP-200 pada umumnya difokuskan pada komoditas padi sawah, namun secara konsep dapat diterapkan pada komoditas lain, seperti jagung, sayuran dan lain sesuai dengan kondisi lahan, ketersediaan air, dan kebijakan daerah.

Program IP-200 dilaksanakan sejak tahun 2020 dan direncanakan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi pertanian setempat.

program Indeks Pertanaman (IP) 200 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi didukung oleh kebijakan, peraturan, dan program pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu lokasi potensi pertanaman padi dengan luas sekitar 79,30 hektar, di mana sebagian lahan (sekitar 30 hektar) telah menerapkan pola tanam IP 200.

Berikut adalah poin-poin peraturan dan kebijakan yang mendasari program IP 200 di wilayah tersebut:

- a) Dukungan Dana Desa (APBDes): Program IP 200 di Kecamatan Benai, termasuk di dusun muaro, didorong melalui pendanaan APBDes. Ini berarti peraturan desa (Perdes) tentang APBDes di Desa Tebing Tinggi memuat aturan penganggaran untuk sarana dan prasarana pertanian IP 200.
- b) Kebijakan Bupati Kuantan Singingi: Bupati Kuansing mendorong secara masif program IP 200 sebagai strategi peningkatan produksi pertanian (swasembada beras) dan memaksimalkan lahan produktif.
- c) Peraturan Teknis BPP: Pelaksanaan program di lapangan, termasuk di Desa Tebing Tinggi, didampingi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Benai yang beroperasi berdasarkan peraturan daerah/bupati terkait fungsi penyuluhan.

- d) Pola Tanam dan Varietas: Terdapat aturan teknis mengenai pola tanam yang berbeda antara musim kemarau dan hujan, serta pemilihan varietas padi yang sesuai.

Desa Tebing Tinggi sendiri pernah menjadi lokasi syukuran panen raya padi IP200 yang dihadiri Gubernur Riau dan Bupati Kuantan Singingi pada tahun 2021, menegaskan perannya sebagai salah satu percontohan untuk swasembada pangan di Kuantan Singingi.

Tabel I. 1: Rab IP200 tahun 2024

PEMERINTAH DESA TEBING TINGGI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 Jenis APBDes : Perubahan APBDes								
Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Kegiatan : 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Ketahanan Pangan Desa								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			188.500.000,00			188.500.000,00	0,00
	01. Pengembangan Padi IP 300			188.500.000,00			188.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			166.300.000,00			166.300.000,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			3.500.000,00			3.500.000,00	0,00
	01. Ketua DDS	1 OK	1.300.000,00	1.300.000,00	1 OK	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	02. Sekretaris DDS	1 OK	1.200.000,00	1.200.000,00	1 OK	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	03. Anggota DDS	1 OK	1.000.000,00	1.000.000,00	1 OK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			162.800.000,00			162.800.000,00	0,00
	01. Upah Pengolahan Lahan (44 Borongan x 37 Ha) DDS	1.628 Borongan	100.000,00	162.800.000,00	1.628 Borongan	100.000,00	162.800.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			22.200.000,00			22.200.000,00	0,00
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			22.200.000,00			22.200.000,00	0,00
	01. Benih Padi DDS	1.110 Kg	20.000,00	22.200.000,00	1.110 Kg	20.000,00	22.200.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			188.500.000,00			188.500.000,00	0,00
Mengesahkan, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA			TEBING TINGGI, 11 May 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,			
ANDRISMAN		A ALFI QADRI, S.Pd			HAPES PADEWA			

Analisis program IP200 ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan program dalam pelaksanaannya, serta memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas program, memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan keberlanjutan program IP200 di Desa Tebing Tinggi.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan dan tantangan program IP200 di Desa Tebing Tinggi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, program IP200 tidak hanya meningkatkan produksi padi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa program IP200 masih mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Maka penulis tertarik untuk menyusun usulan penelitian dan mengambil judul : **“Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2. Rumus Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singing.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoretis

Bagi peneliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis sebagai bahan masukan dan pembanding atas penelitian yang akan dilakukan nantinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat membantu Pemerintah Desa Tebing Tinggi dalam memahami pelaksanaan program IP200.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata, administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada mereka”. Kata “administrasi” juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata “*to administer*” dapat berarti “*to manage*” (mengelola) dan “*to direct*” (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan.

Menurut Juharni (2015 : 2) istilah administrasi negara mempunyai berbagai macam definisi. Akan tetapi jika kalau kita menelaah lebih mendalam tentang definisi-definisi mengenai administrasi negara maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda. Pola pertama adalah memandang bahwa administrasi negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif. Pola kedua memandang bahwa administrasi negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kesemuanya adalah bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

Menurut Ali (2015 : 100) setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta dipengaruhi oleh

pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori struktural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip *non hierarkis* teori perilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi.

Menurut The Liang Gie (2010 : 14) administrasi dalam arti luas merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan dalam arti sempit yaitu kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Menurut Sondang P. Siagian (2014 : 2) mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Leonard B. White (dalam Syafiie, 2019 : 4) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2019: 4) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat, harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019 : 29). mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna

mencapai tujuan yang telah diterapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie, 2019 : 5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie, 2019 : 5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian dari proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Umar Congge (2017 : 11) administrasi publik atau dulu dikenal administrasi negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri adalah *public service* atau pelayanan publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang politik, hukum, sosial serta manajemen, salah satu tugas dari administrasi publik adalah pembuat kebijakan atau *policy maker* yang dikenal dengan kebijakan publik. Artinya para *administrator* ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di publik (masyarakat).

Definisi administrasi publik terbagi atas 2 (dua), yaitu :

1. Arti sempit, administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif).
2. Arti luas, administrasi negara yang dilakukan oleh ketiga cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Rosenbloom (dalam Budi Nugraha, 2022 : 37-38) bahwa administrasi publik yaitu pemanfaatan teori-teori serta proses-proses dari aspek manajemen, aspek politik, maupun aspek hukum untuk dapat memenuhi harapan pemerintah dibidang legislative, eksekutif, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan pada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Budi Nugraha dkk (2022 : 10) administrasi negara merupakan sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintah dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino, 2006 : 6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repetisi*) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dia maksud.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (dalam Edi Suharto, 2007 : 4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007 : 3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Aderson (dalam Budi Winarno, 2007 : 20-21) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi. Konsep kebijakan yang ditawarkan Anderson

(dalam Budi Winarno, 2007 : 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di berbagai alternatif yang ada.

Pandangan Budi Winarno (2007 : 22) titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam system politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam system politik.

Masih dalam pandangan Budi Winarno (2007 : 24) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.

Budi Winarno (2007 : 26) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.

Menurut Richard Rose (dalam Budi Winarno, 2007 : 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan

keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai suatu arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008 : 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli maka untuk memahami istilah kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (2008 : 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan merangkul perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi yang bersifat intra organisasi

Menurut Budi Winarno (2007 : 15) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang dan mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang *debirokratisasi* dan

deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Menurut Suharno (2010 : 22-24) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam syistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

Masih menurut Suharno (2010 : 25) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implemetasi dan pemaksaan pemberlakuan.

Pandangan dari Suharno (2010 : 27) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang kenyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Dari beberapa ciri kebijakan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan suatu kebijakan tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan keberadaannya saja, namun suatu kebijakan seharusnya disusun karena adanya keperluan untuk diadakan suatu kebijakan baru berdasarkan masalah yang ada dengan tujuan yang tepat. Kebanyakan kebijakan saat ini hanya mengalami bongkar pasang dikarenakan dalam penyusunan tidak dipertimbangkan dengan matang.

2.1.3. Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004 : 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006 : 65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Implementasi menurut Jones merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. (dalam Leo Agustino,

2008 : 139). Selanjutnya Jones mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Menurut Rian Nugroho (2003 : 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Rian Nugroho (2003 : 158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik.

Rian Nugroho (2003 : 13) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005 : 99) menyebutkan terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan : yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya : kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik agen pelaksana : meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana : implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik : pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit,

peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana : persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Menurut Richard Martland (dalam Nugroho, 2003 : 179) pada prinsipnya ada 4 (empat) tepat yang perlu penuh dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan.

1. Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat /swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan masyarakat.

3. Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategik dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Tachjan (2006 : 28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu :

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock (dalam Tachjan, 2006 : 28) pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan

program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Dimock dan Dimock (dalam Tachjan, 2006 : 28) suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Dimock dan Dimock (dalam Tachjan, 2006 : 28) target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007 : 158) terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaa.
4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
5. kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
6. Kecenderungan para pelaksana.

Menurut George C. Edward III (dalam Sujianto, 2008 : 38-45) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal struktur birokrasi ini, yaitu prosedur rutin atau standar

prosedur operasi dan *fragmentasi* (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

2.1.4. Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Menurut Hasibuan (dalam Riinawati, 2019 : 161) memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nanang Fatah (dalam Riinawati, 2019 : 15) berpendapat bahwa istilah organisai mempunyai dua pengertian umum. Pertama : organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua : merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan itu diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif.

Menurut Weber (dalam Silalahi, 2011 : 124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Organisasi telah dideskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins (dalam Edison dkk, 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson (dalam Edison dkk, 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Menurut Khalil (dalam Edison dkk, 2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Etzioni (dalam Silalahi, 2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.

Masih menurut Etzioni (dalam Silalahi, 2011 : 127) adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi

pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (dalam Edison dkk, 2016 : 54) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda, hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda.

Menurut Hasibuan (2011 : 120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dalam kelompok orang yng bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Amirullah Haris Budiono (dalam Karyoto, 2016 : 30) organisasi adalah pengelolaan orang-orag yang dilakukan secara sengaja untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pengaturan para pekerja dimaksudkan agar mereka dapat mengetahui posisi, tugas, dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Stoner (dalam Mulyadi, 2015 : 6) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang dibawa pengarah pimpinan mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut Adam Wijaya (dalam Mulyadi, 2015 : 11) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia.

Edison dkk (2016 : 54) tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu di desain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Dibawah ini akan di bahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya.

Menurut E. Wight (dalam Yoyo, 2019 : 167) organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan mentransformasi, dan menyatukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia.

2.1.5. Teori/Konsep Pemerintah Desa

Menurut R. Bintarto (dalam Fairus Adira, 2020 : 19) desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam disuatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Menurut Ulber Silalahi (2022 : 29) desa merupakan salah satu entitas politik yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia

Desa merupakan sebutan penyeragama untuk bentuk pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama lain desa seperti “Nagari” di Sumatera Barat, “Gampong” di Nangroe Aceh Darussalam, “Lembang” di Sulawesi Selatan, “Kampung” di Kalimantan Selatan dan Papua dan “Negeri” di Maluku. (H. Rozali Abdullah, 2007 : 167).

Menurut HAW. Widjaja (2005 : 91) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (HAW. Widjaja, 2005 : 93).

Desa memerlukan dukungan keuangan dan dukungan struktur organisasi, dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dukungan lingkungan dukungan lingkungan terhadap pemerintahan desa terletak pada kenyataan bahwa kepala desa maupun pembantu-pembantunya merupakan tokoh-tokoh pilihan masyarakat setempat. Dengan kemampuan administrasi pemerintah desa diharapkan mampu menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan masukan-masukan. Mencegah berbagai akses sistem dari atas ke bawah dan mengefektifkan

sistem dari bawah ke atas, sehingga sasaran pembangunan desa dapat dicapai. (Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, 2005 : 68).

Dari pengalaman pembangunan perdesaan di banyak Negara, Griffin membagi tiga strategi pembangunan perdesaan : *pertama*, strategi teknokratis, *kedua*, strategi reformis dan *ketiga*, strategi radika. Perbedaan strategi ini memperlihatkan konsistensi, kesinambungan dan tekanan yang terdapat diantara kebijakan, tujuan, pendekatan dan pelaksanaan dari pembangunan perdesaan.

Sedangkan dari sisi mobilitas penduduk, menurut Saefullah ada tiga pendekatan pembangunan perdesaan yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan petani yaitu *commercialization and capital intensive development* : *comprehensive rural development* : and *colonization of new agricultural lands* (komersialisasi dan pengembangan permodalan secara intensif : pembangunan desa secara menyeluruh : dan penguasaan lahan-lahan pertanian baru). Dengan jelas dapat dipahami, pendapat tersebut di atas memandang strategi pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan yang kontekstual. Hal demikian, tentunya hanya dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep manajemen strategis dalam pembangunan. Selain akomodatif, proaktif dan cepat tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat dalam proses modernisasi. (dalam Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, 2005 : 69).

Sistem kehidupan komunal merupakan watak dasar desa mengacu pada tipikal paguyuban yang terjadi dalam proses sosial dan politik desa. Paguyuban dimaksudkan pada tata hubungan manusia desa sebagai keluarga besar dimana diliputi kehendak alami seperti nilai sentiment, tradisi dan ikatan umum yang

mengatur basis hidup dan sumber daya komunal. Istilah sumber daya menunjukkan banyak aspek penting yang menghubungkan dinamika komunitas dengan isu-isu jaminan sosial dan ekonomi desa. Sumber daya bisa berarti aset, hak milik, produk, sarana-sarana, kepunyaan, kemakmuran dan modal. Ini mengarah pada suatu asumsi dasar bahwa sistem kekeluargaan, kekerabatan dan kesetiakawanan memainkan peran penting dalam penyediaan jaminan sosial dan ekonomi di desa. (Madekhan Ali, 2007 : 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat 2 memberikan pengertian tentang pemerintahan desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat 8 memberikan pengertian tentang pembangunan desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2.1.6. Teori/Konsep Indeks Pertanaman 200 dan Ketahanan Pangan

Menurut Soekartawi (2002 : 87) menjelaskan bahwa IP200 menunjukkan kemampuan lahan sawah ditanami dua kali setahun, yang mencerminkan efisiensi pemanfaatan lahan dan air.

Departemen Pertanian Republik Indonesia (2007 : 12) mendefinisikan bahwa IP200 merupakan indeks yang menggambarkan pola tanam dua kali dalam setahun pada lahan yang sama, sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Masih menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia (2007 : 13) IP200 merupakan target peningkatan intensitas pertanaman yang ditetapkan dalam program pemerintah untuk mendorong swasembada dan ketahanan pangan melalui percepatan pola tanam dua kali per tahun pada wilayah beririgasi.

Tiyas Murtiningsih (2021 : 20-22) menjelaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan indeks pertanaman usaha tani pada sawah irigasi diantaranya sebagai berikut :

1. Luas lahan.
2. Pendidikan petani.
3. Jumlah anggota keluarga.
4. Umur petani.
5. Pendapatan.
6. Modal.

Dari 6 (enam) yang dijelaskan Tiyas Murtiningsih (2021 : 20-22) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan indeks pertanaman usaha tani

pada sawah irigasi, penulis mengambil 4 (empat) faktor-faktor tersebut sebagai indikator dalam penelitian ini, yakni :

1. Luas lahan.
2. Pendidikan petani.
3. Umur petani.
4. Pendapatan.

Menurut Suryana ketahanan pangan itu sendiri merupakan sebuah masalah pembangunan berkelanjutan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan pangan dan pertanian, melainkan juga berkaitan erat dengan kesehatan, pembangunan ekonomi, lingkungan dan perdagangan. Sejalan dengan kondisi global, negara negara berkembang termasuk Indonesia akan menghadapi keadaan yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kualitas berkelanjutan ketahanan pangan. (dalam Saptrahmawati et al, 2024 : 257).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur. (dalam Saptrahmawati et al, 2024 : 262-263).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 menyebutkan sistem pangan nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian

pangan sebagai spirit/fondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (dalam Dedy Effendi et al, 2024 : 183).

Menurut Purwaningsih ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganekaragaman pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. (dalam Dedy Effendi et al, 2024 : 184).

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari *food security* mencakup banyak aspek dan luas sehingga setiap orang mencoba menterjemahkan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data. Seperti yang diungkapkan oleh Reutlinger (dalam Handewi P.S et al, 2002 : 13) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara.

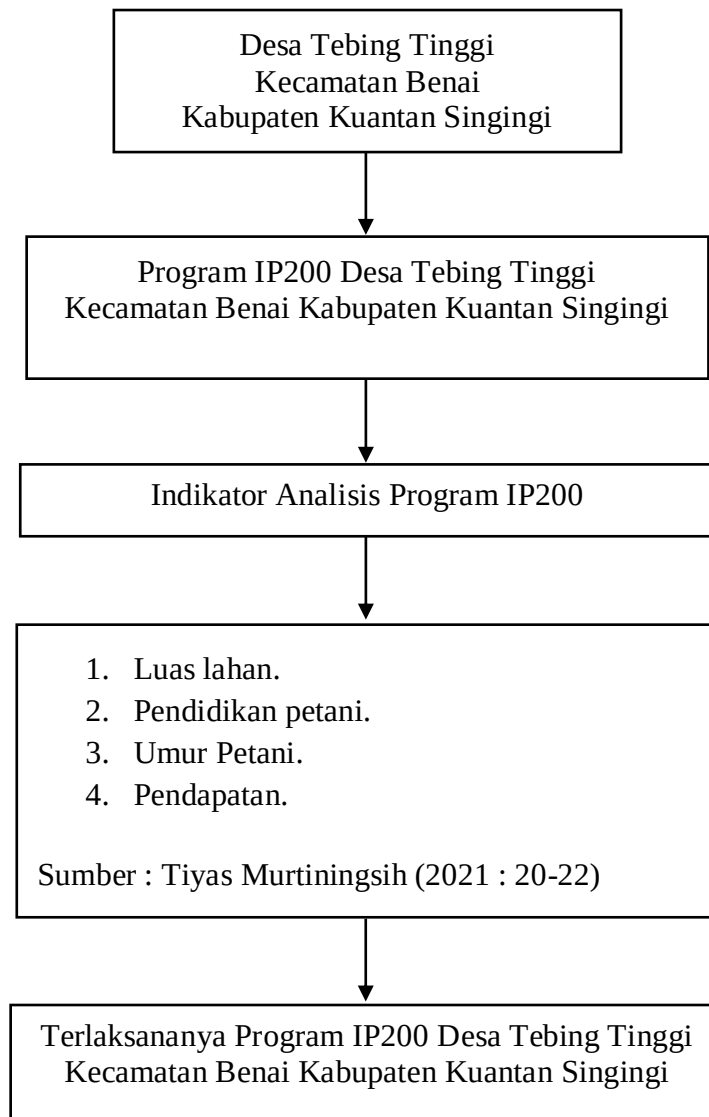
Sedangkan menurut Braun dkk (dalam Handewi P.S et al, 2002 : 13) juga mengungkapkan bahwa pemakaian istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan

perdebatan dan banyak isu yang membingungkan karena aspek ketahanan pangan adalah luas dan banyak tetapi merupakan salah satu konsep yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia.

Simatupang (dalam Handewi P.S et al, 2002 : 15) mengungkapkan bahwa ketahanan pangan tingkat komunitas lokal merupakan syarat keharusan tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan untuk seluruh rumah tangga. Selanjutnya ketahanan pangan tingkat regional merupakan syarat keharusan bagi ketahanan pangan tingkat komunitas lokal tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan komunitas lokal. Pada akhirnya ketahanan pangan tingkat nasional tidak cukup menjamin terwujudnya ketahanan pangan bagi semua orang, setiap saat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan agar dapat hidup sehat dan produktif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar : II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

2.3 Hipotes Penelitian

Hipotesa peneltian tentang analisis program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana secara maksimal.

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Petani

Menurut Richard (dalam Tiyas Murtiningsih, 2021 : 17) pengertian petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan.

2.4.2 Luas Lahan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Tiyas Murtiningsih, 2021 : 20) luas lahan didefinisikan sebagai luas area persawahan yang akan ditanami padi pada musim tertentu.

2.4.3 Pendidikan Petani

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (dalam Tiyas Murtiningsih, 2021 : 22) memberikan definisi pendidikan petani adalah sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia atau pembawa paket teknologi untuk diterapkan petani, menjadi kelembagaan yang menciptakan suasana, iklim, lingkungan, dan

kesempatan yang memungkinkan berkembangnya petani secara mandiri sebagai manajer usahatani atau pemimpin dalam masyarakat agribisnis.

2.4.4 Umur Petani

Menurut Ilfa (dalam Tiyas Murtiningsih, 2021 : 23) umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan, serta umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18-40 tahun, dewasa madya adalah 41-60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun.

2.4.5 Pendapatan

Menurut Rosjidi (dalam Tiyas Murtiningsih, 2021 : 25) pengakuan pendapatan yaitu pada saat direalisasi dan dihasilkan. Direalisasi dalam arti apabila produk atau aktiva lainnya dipertukarkan dengan sejumlah uang kas. Sedangkan dihasilkan adalah sebelum berpindahnya hak atas barang atau jasa, namun secara substansial telah diperoleh pendapatan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Analisis	IP200	1. Luas Lahan	a. 0,8 ha	Ordinal
			b. > 0,8 ha	
		2. Pendidikan Petani	a. Pendidikan Dasar	Ordinal
			b. Pendidikan Menengah	
			c. Pendidikan Tinggi	
		3. Umur Petani	a. 18-40 tahun	Ordinal
			b. 41-60 tahun	
			c. > 60 tahun	
		4. Pendapatan	a. 1-3 Juta	Ordinal
			b. > 3 Juta	

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Guna memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, menggunakan analisis data kualitatif.

Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi (istilah lainnya *informan*). Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa daftar wawancara atau kuesioner untuk disebarakan kepada populasi/*informan* yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2008 : 3).

Sedangkan pengertian deskriptif (*descriptive*) yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (*harfiah*), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari lapangan, atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. (Usman, 2011 : 129).

Menurut Sugiyono (2012 : 1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Informan

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi adalah informan atau pelaku (*actors*), yang sehubungan dengan penelitian serta memiliki pertimbangan seperti sifat dan ciri dari penelitian. (Sugiyono, 2012 : 49-50).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana tertera pada tabel di bawah :

Tabel III. 1 : Jumlah Informan Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Urusan	2	1	50%
4	Kepala Seksi	2	1	50%
5	Badan Permusyawaratan Desa	7	1	14%
6	Kepala Dusun	5	1	20%
7	Petani Dusun Muaro	13	7	54%
Jumlah		31	13	42%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

Adapun teknik penarikan informan yang penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan/sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2012 : 53-54).

3.3 Sumber Data

Data mengenai objek yang diteliti, dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah orang yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016 : 308).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai analisis program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Jl. Raya Teluk Kuntan-Rengat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Kode Pos 283201.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (dalam Sugiyono, 2012 : 72).

3.6.2 Observasi (*observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang dari hal yang penting, yakni proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166).

3.6.3 Dokumentasi (*documentation*)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau yang lainnya. (Sugiyono, 2009 : 240).

3.6.4 Gabungan (*triangulasi*)

Triangulasi dimaknai sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2012 : 83).

3.7 Metode Analisis Data

Data mentah yang diperoleh dari hasil *triangulasi* dianalisis menggunakan model dari Miles dan Huberman. Menurut model ini secara umum proses analisis data mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) serta pengujian keabsahan data. (dalam Sugiyono, 2012 : 88-89).

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. Reduksi data dilakukan guna membuang data hasil pengumpulan data yang tidak relevan dengan fenomena yang coba diangkat dan telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian oleh peneliti. (dalam Sugiyono, 2012 : 88-89).

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini data yang telah direduksi, disajikan dengan

teks yang bersifat naratif sesuai dengan pertanyaan penelitian. (dalam Sugiyono, 2012 : 88-89).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Tahap ini dimulai dengan penyusunan hipotesis kerja atau kesimpulan awal. Kesimpulan awal dapat bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diungkapkan merupakan kesimpulan yang kredibel. (dalam Sugiyono, 2012 : 88-89).

3.7.4 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi uji *kredibilitas* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas). Uji *kredibilitas* terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan *membercheck*. Uji *transferability* menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi dimana sampel tersebut diambil. Pengujian *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian *confirmability* mengkaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Bila

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. (dalam Sugiyono, 2012 : 88-89).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang analisis program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel III. 2 di bawah ini :

Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian tentang Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei			
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal	x	x	x	x	x	x	x	x																
2.	Seminar Proposal								x																
3.	Perbaikan Proposal									x	x														
4.	Penelitian di Lapangan										x	x	x	x											
5.	Pengelolaan dan Analisis Data														x	x	x	x	x	x					
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				x				
7.	Ujian Skripsi																								
8.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					x	x		
9.	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																							x	

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Tebing Tinggi

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu desa di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Tebing Tinggi adalah desa hasil pemekaran dari sebuah kenegerian yang bernama Kenegerian Simandolak yang terdiri dari 5 desa pada tahun 1979. Terdiri dari Desa Tebing Tinggi, Desa Pulau Lancang, Desa Koto Simandolak, Desa Pulau Ingu, dan Desa Tanjung.

Pada tahun 1979 M. Judin Hasan dipercaya untuk menjabat sebagai kepala desa sampai tahun 1986. Selanjutnya, Desa Tebing Tinggi terus berkembang dan berikut adalah Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Tebing Tinggi :

Tabel IV. 1 : Kepala Desa Tebing Tinggi dari Masa ke Masa

No	Nama	Masa jabatan
1.	M. Judin Hasan	1979-1986
2.	Sudirman Manap	1986-2000
3.	Harmadi	2000-2001
4.	Yohanis Yusuf	2001-2006
5.	Hendri Eka Putra	2006-2012
6.	Harmadi	2013-2019
7.	Wenharmis salim	2019
8.	Andrisman	2019-Sekarang

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

4.2 Lokasi Geografis

4.2.1 Keadaan Geografi

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Tebing Tinggi adalah Desa

Hasil Pemekaran dari sebuah Kenegerian yang bernama Kenegerian Simandolak yang terdiri dari 5 Desa pada tahun 1979 yang terdiri dari Desa Tebing Tinggi, Desa Pulau Lancang, Desa Koto Simandolak, Desa Pulau Ingu dan Desa Tanjung. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 4.2.1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya
- 4.2.1.2 Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Benai
- 4.2.1.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benai Kecil
- 4.2.1.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Lancang / Desa Simandolak

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan benai, kabupaten kuantan singingi, provinsi riau, indonesia. Desa tebing tinggi memiliki luas wilayah 750 ha yang terdiri dari atas 5 dusun, 17 RT, dan 7 RW. 5dusun tersebut terdiri atas :

- 4.2.2.1 Dusun Sagiran : 4 RT, 2 RW
- 4.2.2.2 Dusun Muaro : 3 RT, 1 RW
- 4.2.2.3 Dusun Sarona : 3 RT, 1 RW
- 4.2.2.4 Dusun Harapan : 4 RT, 2 RW
- 4.2.2.5 Dusun Jirak : 3 RT, 1 RW

Ditanah yang memiliki luas 750 ha ini. Desa Tebing Tinggi memiliki fasilitas public yang cukup lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Terdapat kantor balai desa, posyandu, badan usaha milik desa, 2 mesjid besar yaitu Masjid Baitul Makmur dan Masjid Al-Huda, 1 Sekolah dasar yaitu SDN 004 Tebing Tinggi, 1 Sekolah Menengah pertama yaitu MTS Babussalam, 1 taman kanak-kanak yaitu TK Baitul Makmur, dan 1 paud yaitu Paud Jasa Bunda.

Secara geografis Desa Tebing Tinggi, terletak diantara :

- 4.2.2.1 Sebelah utara berbatasan dengan Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya.
- 4.2.2.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Benai.
- 4.2.2.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benai Kecil.
- 4.2.2.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Lancang/Desa Simandolak.

Jarak Desa Tebing Tinggi ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu 0,5 KM. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yaitu selama 5 Menit. Jarak Desa Tebing Tinggi ke ibu kota Kabupaten yaitu 15 KM. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten yaitu 20 Menit.

4.2.3 Keadaan Penduduk

Desa Tebing Tinggi di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dihuni oleh sekitar 1.705 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dengan wilayah ini yang dikenal sebagai salah satu sentra utama untuk usahatani padi sawah. Penduduk Desa Tebing Tinggi didominasi oleh perpaduan suku Melayu (asli), suku Jawa, dan suku Minang. Mata Pencarian, Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Selain padi sawah, perekonomian warga didukung oleh komoditas perkebunan khas wilayah Kuantan

Singingi. Fasilitas Umum, Desa ini memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) yang cukup padat dan aktif di tingkat kecamatan, menandakan permukiman yang sudah tertata dengan baik sebagai wilayah perkampungan.

4.2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun Jumlah Penduduk Desa Tebing Tinggi menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut ini:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	861	51%
2	Perempuan	844	49%
Jumlah Total		1.705	100%

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Berdasarkan tabel IV. 2 di atas menunjukkan jumlah penduduk masyarakat Desa TebingTinggi lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Adapun jumlah laki-laki 861 orang dengan persentase 51% sedangkan jumlah perempuan 844 orang dengan persentase 49%.

4.2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk Desa Tebing Tinggi berdasarkan umur dapat di lihat dari tabel bawah ini :

Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase
1	0 -14	435	25%
2	15 – 39	725	43%
3	40 -64	470	28%
4	65 tahun ke atas	75	4%
Jumlah Total		1705	100%

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Dari tabel IV. 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Tebing Tinggi yang berusia kurang dari 0-14 tahun sebanyak 435 orang (25%), penduduk yang berumur antara 15-39 tahun sebanyak 725 orang (43%), penduduk yang berumur antara 40-64 tahun sebanyak 470 orang (28%) dan penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 75 orang (4%).

4.2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang dan keyakinannya. Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Berikut jumlah penduduk Desa Tebing Tinggi berdasarkan agama dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

N0	Kelompok Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	1705	100%
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Khonghucu	-	-
Jumlah Total		1705	100%

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Dari table IV. 4 di atas dapat lihat bahwa mayoritas penduduk Desa Tebing Tinggi mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1705 orang dengan presentase 100%.

4.2.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tebing Tinggi cukup beragam, namun mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, terutama petani padi sawah melalui program IP200. Selain itu, terdapat juga pekerjaan lain seperti :

Tabel IV. 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencairan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani/Pekebun	400
2	Pedagang	135
3	ASN	63
4	Tukang	28
5	Bidan/Perawat	10
6	TNI/Polri	3
7	Buruh	5
8	Swasta	112
Jumlah Total		756

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Dari table IV. 5 dapat dilihat bahwa sebagian besa dari penduduk Desa Tebing Tinggi adalah sebagian petani.

4.2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf hidupnya selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan lambannya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Desa Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 6 : Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD/ MI	490
2	SLTP/ MTs	360
3	SLTA/ MA	460
4	S1/ Diploma	85
5	Putus Sekolah	20
6	Pra sekolah	220
Jumlah Total		1705

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Dari tabel IV. 6 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Tebing Tinggi pada tingkatan SD berjumlah 490 orang, pada tingkatan SMP berjumlah 360 orang, pada tingkatan SLTA berjumlah 460 orang, pada tingkatan Sarjana berjumlah 85 orang, kemudian tidak sekolah berjumlah 20 orang dan pra sekolah berjumlah 220 orang.

4.2.5 Sarana dan Prasarana Desa Tebing Tinggi

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang dari tingkat keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik suatu daerah. Adapun Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Tebing Tinggi secara garis besar adalah sebagai berikut,

Tabel IV. 7 : Prasarana Desa Tebing Tinggi

No	Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Sekolah	4
3	Rumah Ibadah	6
4	Posyandu	1
5	Jalan Kecamatan	1
Jumlah Total		15

Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tebing Tinggi terdapat Sarana dan Prasarana yaitu Kantor Desa berjumlah 1, terdapat 4 Sekolah, lalu 6 Rumah Ibadah, 1 posyandu dan 1 Jalan Kecamatan.

4.2.6 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tebing Tinggi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-

sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor PNS Pemerintahan Daerah, Honorer. Guru dan Petani.

4.2.7 Kondisi Pemerinta Desa

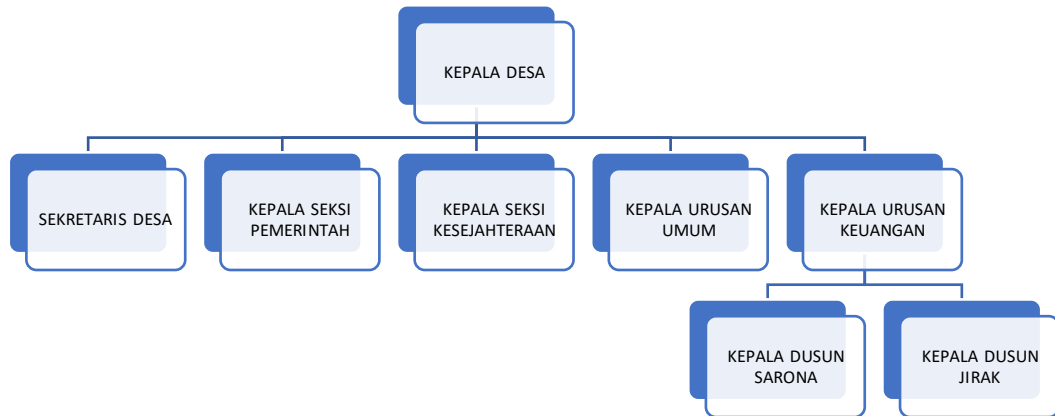
4.2.7.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, minsainya sungai, gunung, atau laut. Pembagian wilayah Desa Tebing Tinggi dibagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Sagiran,Dusun Harapan,Dusun Muaro,Dusun Sarona dan Dusun Jirak. Dimana setiap dusun mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun Sagiran, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

4.2.7.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar V.1 :Struktur Organisasi Pemerinta Desa Tebing Tinggi



Sumber : Kantor Desa Tebing Tinggi 2026

4.2.7.3 Visi, Misi Desa Tebing Tinggi

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potetisi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Tebing Tinggi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Tebing Tinggi adalah:

4.2.7.3.1 Visi :

“Menjadikan Desa Tebing Tinggi Yang Lebih Maju, Sejahterah, Aman, Tentram dan terbaik di Kabupaten Kuantan Singingi maupun Tingkat Provinsi Riau.”

4.1 Misi :

- 4.2.7.2.1.1 Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat yang adil dan transparan.
- 4.2.7.2.1.2 Menerbitkan generasi muda yang Beriman, Berahlak dan Bertaqwa dengan program “Mari Kesurau”.
- 4.2.7.2.1.3 Memberikan Pendidikan yang layak dan terbaik kepada semua masyarakat desa.
- 4.2.7.2.1.4 Menciptakan pemuda yang Sehat, Kompak, Kreatif dan Mandiri serta jauh dari narkoba.
- 4.2.7.2.1.5 Menjadikan PKK sebagai wadah tempat Ibu-Ibu untuk berkumpul dan bersama-sama mengembangkan ide-ide dan gagasan demi kemajuan Desa.
- 4.2.7.2.1.6 Tertib Administrasi, tertib Laporan Keuangan dan Transparansi;

BAB VI

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program IP200 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan dengan cukup baik dan dapat peningkatan intensitas tanam dan produksi padi. Program ini mampu mendorong petani untuk melakukan penanaman dua kali dalam setahun sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh partisipasi petani, dukungan pemerintah, serta ketersediaan sarana produksi yang memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pengairan, serangan hama dan penyakit, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis Program IP200 Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat terus meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program IP200 melalui perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, penyediaan sarana produksi yang memadai, serta peningkatan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

6.2.2 Bagi Petani Desa Tebing Tinggi

Diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi budidaya padi serta memanfaatkan sarana produksi secara efektif dan efisien guna meningkatkan produktivitas usahatani.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program IP200 serta dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sobirin, 2007, *Budaya Organisasi Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Adira, Fairus, 2020, *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*, Jogjakarta, Pixelindo.
- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrtasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses (Edisi. Revisi)*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Congge, Umar, 2017, *Patologi Administrasi Negara*, Makassar. CV. Sah Media.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Askara.
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Harbani Pasalong, 2012, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alpa Beta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Juharni, 2015, *Penghantar Ilmu Administrasi Negara*, Makasar. CV. Sah Media.
- Karyoto, 2016, *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Defenisi dan Konsep*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES Indonesia.
- Madekhan Ali, 2007, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Jawa Timur, Averroes Press.
- Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Sulawesi, Unimal Press.
- Muiyadi, Deddy, 2015, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Bandung, CV. Alfabeta.
- N. Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Nugraha, Budi dkk, 2022, *Teori Administrasi*, Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi Redaksi.

- Pamudji, 1985, *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah "Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara"*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Rusli Zainal, 2006, *Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) Di Provinsi Riau Dalam Teori, Fakta dan Alternatif Penanggulan*, Pekanbaru. LPNU Press.
- Rian Nugroho, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riinawati, 2019, *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*, Banjarmasin, Pustaka Baru Press Banjarmasin.
- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber, 2011, *Asas Asas Manajemen*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Soekartawi, 2002, *Analisis Usaha Tani*, Jakarta, UI Press.
- Sondang P Siagian, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P Siagian, 2003, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sondang P Siagian, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, 2005, *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*, Pekanbaru, Multi Grafindo.
- Subarsono, AG, 2009, *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisa Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

- Syafiie, Inu Kencana, 2000, *Alquran dan Ilmu Administrasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Syafiie Inu Kencana, 2010, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisa Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Bandung, CV. Alfabeta.
- S. Pamudji, 2004, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisa Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, UNY Press.
- Syafiie, Inu kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencanan, 2010, *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami Cetakan I*, Jakarta, Gradedia Pustaka Utama.
- Syafri, Wirman, 2012, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Erlangga.
- Tb. Sjafri Mangkuprawira, 2009, *Bisnis Manajemen dan Sumberdaya Manusia*. Bogor, IPB Press.
- Winardi, 2003, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yoyo, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*, Bandung, Penerbit Andi.

B. Jurnal

- Dedy Effendi, W. S. dan N. Y, 2024, *Ekonomi Berkelanjutan: Kunci Ketahanan Pangan dan Kemajuan Indonesia Emas di IKN*, *Jurnal Geoekonomi*, 15 (1), 181-188.
- Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani, 2002, *Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi*. 20 (1), 12-24.

Murtiningsih, T, 2021, *Faktor Penentu dan Keberlanjutan Indeks Pertanaman Padi pada IP200 dan IP300 di Daerah Irigasi Belitang Kabupaten Oku Timur*, Jurnal Bakti Agribisnis, 7 (2), 10-24.

Saptarahmawati, Nurman, & Suri, 2024, *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau*. 10 (2), 256-274. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.19127>.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Buku Panduan Penulisan Proposal, Skripsi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2010, *Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Pengelolaan Tanaman Dan Sumberdaya Air*. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, 2009, *Pedoman Indeks Pertanaman (IP) Nasional*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Petani yang Mengikuti Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Anjelisa Pebrianti
NPM : 220411013
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Luas lahan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Berapakah luas lahan Bapak/Ibu saat mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Apakah luas lahan Bapak/Ibu saat mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi seluas 0,8 ha ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Apakah luas lahan Bapak/Ibu saat mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih dari 0,8 ha ?

Berikan Ulasan

.....
.....

B. Pendidikan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah Bapak berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau berpendidikan tamat dari perguruan tinggi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

C. Umur petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Berapa umur Bapak/Ibu saat mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

D. Pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Berapakah pendapatan Bapak/Ibu, jika hasil panen dijual dalam 1 kali panen ?

Berikan Ulasan

.....
.....

E. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Hambatan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apakah hambatan/rintangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Apakah setiap hambatan/rintangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat diselesaikan dengan baik ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Hambatan/rintangan dalam bentuk apakah yang Bapak/ibu hadapai dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

Solusi dalam perumusan pembuatan peraturan desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Apa solusi yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimanakah solusi itu diterapkan oleh Bapak/Ibu, dan pihak mana yang lebih berwenang atas hal dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Apakah Pihak Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai atau memiliki langkah untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Anjelisa Pebrianti
NPM	: 220411013
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

E. Pertanyaan wawancara untuk unsur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Luas lahan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Berapakah luas lahan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

5. Apakah luas lahan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 0,8 ha per orang ?

Berikan Ulasan

.....
.....

6. Apakah ada luas lahan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas lebih dari 0,8 ha per orang ?

Berikan Ulasan

.....
.....

G. Pendidikan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berpendidikan sekolah dasar ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berpendidikan sekolah menengah ?

Berikan Ulasan

.....
.....

4. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berpendidikan tinggi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

H. Umur petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berumur 18-40 tahun ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berumur 41-60 tahun ?

Berikan Ulasan

.....
.....

4. Berapa orangkah petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berumur 60 tahun ke atas ?

Berikan Ulasan

.....
.....

I. Pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Berapakah pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam 1 kali panen ?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Apakah pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 1-3 juta dalam 1 kali panen ?

Berikan Ulasan

.....
.....

4. Apakah pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mencapai lebih dari 3 juta dalam 1 kali panen ?

Berikan Ulasan

.....
.....

5. Berapakah kira-kira pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi jika luas lahan yang dimiliki seluas 0,8 ha ?

Berikan Ulasan

.....
.....

6. Berapakah kira-kira pendapatan petani yang mengikuti program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi jika luas lahan yang dimiliki seluas lebih dari 0,8 ha ?

Berikan Ulasan

.....
.....

J. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Hambatan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Apakah hambatan/rintangan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

5. Apakah setiap hambatan/rintangan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat diselesaikan dengan baik ?

Berikan Ulasan

.....
.....

6. Hambatan/rintangan dalam bentuk apakah yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

Solusi dalam perumusan pembuatan peraturan desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Apa solusi yang baik untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

5. Bagaimanakah solusi itu diterapkan, dan pihak mana yang lebih berwenang atas hal dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

6. Apakah Pihak Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai atau memiliki langkah untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

Berikan Ulasan

.....
.....

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS
PROGRAM IP200 (INDEKS PETANAMAN DUA KALI PANEN
DALAM SETAHUN) DIDESA TEBING TINGGI KECAMATAN
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Gambar I :Wawancara Dengan Kepala
Desa



Gambar II : Wawancara Dengan
Sekretaris Desa



Gambar III : Wawancara Dengan BPD



Gambar IV : Wawancara Dengan Kepala
Dusun Muaro



Gambar V : Kepala Usurasan Pelaksana Program IP200



Gambar IV : Kepala Seksi Pelaksana Program IP200



Gambar VI : Wawancara Dengan Petani



Gambar VII : Wawancara Dengan Petani



Gambar VIII : wawancara Dengan Petani



Gambar IX : Wawancara Dengan Petani



Gambar X : Wawancara Dengan Petani



Gambar XI : Wawancara Dengan Petani



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 011 / Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :
- a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
 - b. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

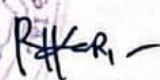
Nama : Anjelisa Pebrianti
NPM : 220411013
Judul Skripsi : Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Program IP200 (Indeks Pertanaman dua kali dalam Setahun) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025

Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Penyusunan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN BENAI
KANTOR DESA TEBING TINGGI**

Jln. Lintas Teluk Kuantan-Rengat Desa Tebing Tinggi email : tebingtinggikito@gmail.com
Web : <https://tebingtinggidesakitobasama.blogspot.com>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 224/TT/SKP/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ANJELISA PEBRIANTI
NIM	: 220411013
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	: FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS RIAU

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di desa tebing tinggi dengan judul **"ANALISIS PROGRAM IP200 DIDESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA DESA TEBING TINGGI



ANDRISMAN



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto, KM 7 Kebun Nenas-Jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

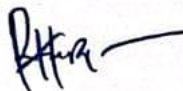
LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : ANJELISA PEBRIANTI
NPM : 220411013
PEMBIMBING I : RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
PEMBIMBING II : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PROGRAM IP200 DI DESA TEBING
TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	27/10 2025	- Cover - margin		
2		- lambang 3x3 - Tulisan		
3	12/11 2025	- Daftar isi - Kerangka Pikiran		
4		- latar belakang - Abstrak		
5	17/12 2025	- Tambahkan teori - Daftar pustaka		
6		- Daftar Tabel		
7	07/01 2026	- rapikan tulisan - margin		

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
8	20/1/26	Acc		
9	25/1/26	Dasar program IP 200 3		
10		Latihan beladiri		
11	11/02-26	Rapikan penulisan Referensi & update minimal 2016		
12		Respons dan perhitungan		
13		Case III apa teknik penulisan		
14	3/03-26	Daftar pustaka		
15				
16				

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901



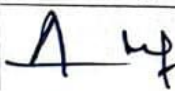
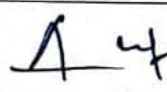
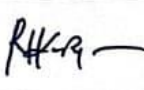
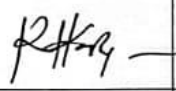
YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto, KM 7 Kebun Nenas-Jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANJELISA PEBRIANTI
NPM : 220411013
PEMBIMBING I : RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
PEMBIMBING II : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PROGRAM IP200 DI DESA TEBING
TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	29/2026/06	Perbaiki margin		Ay
2		Rapikan Tulisan		Ay
3		Sesuaikan dengan indikator penelitian.		
4	06/2026/07	Perbaiki pendahuluan		Ay
5		Perbaiki penyajian hasil penelitian		
6	20/2026/07	Tambahkan analisis		Ay
7		Tambahkan Abstrak		Ay

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
8	23/2026 07	Lengkap lampiran		
9	20/26 7	Acc		
10	3/08-26	Tambahkan Analisis		
11		psd= setiap Indikator penera		
12	10/08-26	Analisis		
13		psd= 5.3 2- cukup		
14		Uraikan		
15	14/08-26	Analisis 5.3 lengkap		
16		Uraikan		

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Anjelisa Pebrianti

NPM : 220411013

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis, 23 April 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.SIP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Anjelisa Pebrianti

NPM : 220411013

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Program IP200 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.IP., M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anjelisa Pebrianti
Tempat/Tanggal Lahir : Simandolak/01 Februari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Sarona
Alamat Email : anjelisafebrianti@gmail.com
Pendidikan :
1. TK Babussalam, Tahun 2009-2010
2. SDN 007 Simandolak, Tahun 2010-2016
3. MTS Babussalam Kenegerian Simandolak, Tahun 2016-2019
4. SMA Negeri 1 Benai, Tahun 2019-2022

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 10 Juni 2026

Penulis

ANJELISA PEBRIANTI
NPM.22041101413